

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebijakan pendidikan secara umum yang mengatur tentang sistem pendidikan disebut dengan kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan sudah banyak dilahirkan yang bertujuan untuk mempermudah dan memfasilitasi penyelenggara pendidikan dan masyarakat untuk dapat mengembangkan pendidikan secara inovatif untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Sebagaimana dikemukakan oleh Riant Nugroho mengatakan bahwa kebijakan pendidikan adalah kebijakan publik bidang pendidikan. Kebijakan pendidikan berkenan dengan kumpulan hukum atau aturan yang mengatur pelaksanaan sistem pendidikan, yang tercakup didalamnya tujuan pendidikan bagaimana tercapai tujuan tersebut. Kebijakan pendidikan harus sejalan dengan kebijakan publik. Di dalam konteks kebijakan publik secara umum, yaitu kebijakan pembangunan, maka kebijakan pendidikan dipahami sebagai kebijakan dibidang pendidikan, untuk mencapai tujuan pembangunan bangsa dibidang pendidikan, sebagai satu dari tujuan bangsa secara keseluruhan.¹ Dengan melihat pandangan di atas maka dapat di pahami secara umum pendidikan mencapai tujuan dan menurut ahli kebijakan publik.

¹ Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan (Jurnal)* Hlm1.

Kebijakan pendidikan merupakan aktivitas politik yang dilaksanakan dengan sengaja berdasarkan pemikiran yang kebijaksana dan terarah yang dilakukan oleh organisasi, lembaga maupun pemerintah dalam memecahkan permasalahan untuk mendapatkan keputusan yang sesuai dengan tujuan. Setiap aspek kehidupan terdapat kebijakan masing-masing yang dijadikan pedoman dan panduan dalam melakukan aktivitas dan membatasi perilaku sehingga lebih jelas dan terarah. Kebijakan ini pun berlaku pada sistem pendidikan yang disebut dengan kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan ada dikarenakan munculnya permasalahan-permasalahan yang terjadi dibidang pendidikan. Permasalahan ini terjadi karena terdapat kesenjangan antara penyelenggara pendidikan dengan tujuan pendidikan.

Kebijakan Pendidikan merupakan sebuah aktivitas dalam merumuskan langkah maupun tahapan dalam penyelenggaraan pendidikan melalui penjabaran visi misi pendidikan yang bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan pada waktu tertentu. Kebijakan pendidikan merupakan kebijakan berhubungan dengan bidang pendidikan dalam proses agar tercapainya tujuan pendidikan melalui langkah strategis pelaksanaan pendidikan. Komponen kebijakan pendidikan terdiri dari lima yaitu tujuan, rencana, program, keputusan dan dampak. Dengan melihat pandangan maka dapat dipahami kebijakan pendidikan adanya dalam bidang

pendidikan kesenjangan dalam strategis pelaksanaan pendidikan dalam tujuan pendidikan

Menurut Ali Mudlofir, bahwa profesi adalah suatu pekerjaan yang menuntut kemampuan intelektual khusus yang diperoleh melalui kegiatan belajar dan pelatihan yang bertujuan untuk menguasai keterampilan atau keahlian dalam melayani atau memberikan advis pada orang lain dengan memperoleh upah atau gaji dalam jumlah tertentu.² Secara terminologi profesi ini dapat dikatakan sebagai suatu pekerjaan yang akan menyaratkan pendidikan tinggi lagi pelakunya yang sudah di tekankan pada pekerjaan mental bukan manual.³

Dengan melihat pandangan di atas maka dapat dipahami, bahwa untuk mencapai tujuan profesi harus ada usaha yang keterampilan dan keahlian dalam pekerjaan. berasal dari kata profesi dalam suatu bidang pekerjaan yang akan ditekuni oleh seseorang, bahwa ia akan mengabdikan dirinya pada suatu pejabat atau pekerjaan karena orang tersebut merasa terpanggil untuk menjabat pekerjaan profesionalitas berarti sikap yang lebih baik yang akan ditampilkan dalam perbuatan dan komitmen untuk meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan mental yang akan ditunjangkan dalam kepribadian dan sikap profesional yang sesuai dengan profesinya. Profesiolitas guru dapat dipengaruhi oleh sikap,

² Alim Mudlofir, *Pendidikan Profesional* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013). 6

³ H Alam, Buchari, *Guru Profesional* (Bandung: Alfabeta, 2021). 3

motivasi, disiplin kerja, kurikulum serta pemahaman terhadap manajemen pendidikan.

Dalam meningkatkan kesejahteraan guru, pemerintah harus mendukung di dalamnya untuk memberikan reward atau tunjangan yang dapat diberikan kepada guru sehingga kehidupan guru dimasa mendatang dapat lebih sejahtera dalam kegiatan belajar mengajar yang dilakukan didalam kelas dapat dilaksanakan dengan efektif oleh sebab itu, utamakan kesejahteraan guru lebih dahulu agar kinerja yang dihasilkan pun akan mendorong proses pembelajaran yang diharapkan dapat tercapai dengan baik.⁴ Menurut Abraham Maslow teori kesejahteraan kerja guru honorer sering di hadapkan pada masalah kesejahteraan karena status pekerjaan yang tidak tetap. Menurut teori kesejahteraan kerja, dukungan terhadap kondisi ekonomi, lingkungan kerja, dan pengakuan sosial sangat penting untuk meningkatkan kinerja kerja mereka dan teori pada ketidakh setaraan sosial teori ini menjelaskan ketimpangan antara guru honorer dan guru tetap dalam hal penghasilan, status, dan perlakuan di tempat kerja. Hal ini dapat menyebabkan rasa ketidakadilan yang memengaruhi motivasi dan produktivitas.⁵

Berdasarkan hasil pengamatan awal di UPT SDN 10 Gandangbatu Sillanan melihat terjadinya ketidakadilan dalam kesenjangan antara guru

⁴ Ida Ningsih, *Motivation and Personality* (Riau: Pekan Baru, 2019), 5.

⁵ Abraham Maslow, *Motivation and Personality* (Harpen dan Publisers, 1954), 4.

ASN dengan guru honorer, dari segi tunjangan, jadwal mengajar, administrasi dan idealnya guru perlu kesejahteraan dalam bidangnya tetapi pada realitas terdapat tantangan yang dihadapi khususnya guru yang masih status tenaga honorer yang mengabdikan diri namun seringkali dihadapkan berbagai masalah yang mempengaruhi kesejahteraan mereka, seperti ketidakpastian status banyaknya guru honorer tidak memiliki kepastian berapa lama mereka akan dipekerjakan dan apakah kontrak mereka akan diperpanjang, penghasilan yang rendah, berdampak pada kestabilan keuangan mereka, membuat banyak guru honorer kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Guru honorer juga menghadapi tantangan dalam membangun kesejahteraan sosial sehingga mengakibatkan kurangnya pengakuan terhadap prestasi mereka dalam dunia pendidikan. Pada kenyataannya guru honorer berperan dan bertanggung jawab dalam meningkatkan kesejahteraan yang berkualitas dan menjadi paduan berkolaborasi dalam melengkapi pengembangan kesejahteraan guru honorer. Berdasarkan masalah tersebut di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis.

B. Fokus Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penulis berfokus pada penelitian ini yaitu bagaimana kebijakan pendidikan terhadap kesejahteraan guru honorer PAK. Di UPT SDN 10 Gandangbatu Sillana.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan pendidikan terhadap kesejahteraan guru honorer PAK. Di UPT SDN 10 Gandangbatu Sillanan?

D. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis kebijakan pendidikan terhadap kesejahteraan guru honorer PAK UPT SDN 10 Gandangbatu Sillanan

E. Manfaat Penelitian**1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis dengan menyediakan pemahaman mendalam tentang konsep dan aspek-aspek. Hal ini dapat memperkaya wawasan teoritis dan menjadi dasar bagi penelitian lebih lanjut dalam bidang ini.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Guru

Penelitian ini dapat memberikan masukan yang positif mengenai keterampilan kesejahteraan guru dalam melakukan tugas dan Tanggung jawab sebagai guru disekolah walaupun status masih honorer

b. Bagi peneliti

Peneliti ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman yang lebih luas mengenai keterampilan kesejahteraan guru dan bagi dalam bertanggung jawab sebagai guru secara khusus dalam kesejahteraan di Sekolah Gandangbatu Sillanan.

c. Mahasiswa

Menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

F. Sistematika Penulisan

BAB I Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian.

BAB II Dalam Bab ini pengertian kebijakan pendidikan di Indonesia secara umum, kebijakan pendidikan, pengertian kesejahteraan dan guru honorer Pendidikan Agama Kristen

BAB III Bab ini akan membahas tentang metodologi penelitian yang meliputi: Setting rancangan tindakan penelitian, Indicator

capaian, instrument yang digunakan, teknik pengumpulan data, data dan teknik analisis data.

BAB IV Pemaparan hasil penelitian dan analisis

BAB V Kesimpulan dan saran.